



Isu HAM dan Korupsi Menjadi Fokus

Tim sukses capres dan cawapres pada Pemilu 2019 serius menyiapkan pertanyaan rahasia yang akan dilontarkan ke pasangan calon lain. Penampilan prima saat debat diyakini mampu mendongkrak elektabilitas pasangan calon.

JAKARTA, KOMPAS — Menghadapi debat presidensial pertama Pemilu 2019 yang akan digelar 17 Januari mendatang, tim sukses kedua pasangan calon presiden-serius menyiapkan pertanyaan yang akan ditujukan kepada pasangan lain saat sesi pertanyaan tertutup. Dari empat tema debat yang diangkat, kedua pihak cenderung lebih fokus pada isu hak asasi manusia dan pemberantasan korupsi.

Pertanyaan tertutup yang disiapkan setiap pasangan calon ini diharapkan bisa membuat suasana debat lebih hidup dan orisinal, untuk mengimbangi pertanyaan terbuka dari panelis yang disiapkan Komisi Pemilihan Umum, yang akan dikirimkan lebih dahulu kepada para pasangan calon.

Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Mardani Ali Sera, di Jakarta, Selasa (8/1/2019), mengatakan, pihaknya akan fokus pada empat tema yang dijadikan topik debat pertama, yaitu penegakan hukum, HAM, pemberantasan korupsi, dan terorisme. Namun, pihaknya lebih condong fokus pada isu pemberantasan korupsi.

Beberapa kasus yang terjadi selama pemerintahan Joko Widodo akan diangkat, seperti penyelesaian kasus penganiayaan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Novel Baswedan. Upaya pelemahan KPK yang dimotori fraksi-fraksi partai pendukung pemerintah di DPR yang terjadi pada pemerintahan Jokowi juga akan diangkat.

Sementara itu, juru bicara Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily, menyoroti tema HAM dan pemberantasan korupsi dalam visi-misi Pra-



bowo-Sandi. Misi-visi Prabowo-Sandi yang tidak mengandung istilah HAM, menurut dia, kemungkinan akan dikritisi dan didalam Jokowi-Ma'ruf saat debat.

Ace juga menyoroti aspek pemberantasan korupsi dalam visi-misi Prabowo-Sandi yang cenderung normatif. Semua program itu dinilai masih klise dan meniru apa yang sudah pernah dikerjakan Jokowi. Ini misalnya program *smart government* yang sudah dijalankan Jokowi selama empat tahun terakhir lewat sistem *e-government*.

Elektabilitas

Direktur Eksekutif Indikator Burhanuddin Muhtadi mengatakan, berkaca pada debat saat Pilpres 2014, debat capres-cawapres dapat berpengaruh signifikan pada elektabilitas pasangan calon. Menurut dia, salah satu titik balik Jokowi-Jusuf Kalla yang mendongkrak elektabilitas mereka adalah performa saat debat.

"Jadi, kedua pasangan harus mempersiapkan diri semaksimal mungkin agar tampil meyakinkan dalam debat. Bukan hanya penguasaan substansi, melainkan juga aspek lain, seperti penampilan, artikulasi, dan gaya komunikasi," katanya.

Pasangan calon yang tampil baik saat debat diprediksi bisa menggaet pemilih mengambang dan pemilih tidak loyal setiap pasangan calon. Hasil survei Indikator yang diadakan pada 16-26 Desember 2018, jumlah pemilih meng-

ambang masih 25 persen. Itu merupakan campuran pemilih yang belum menentukan pilihan dan yang sudah menentukan tetapi belum yakin dengan pilihannya (tak loyal).

Hasil survei Indikator, elektabilitas Jokowi-Ma'ruf 54,9 persen dan Prabowo-Sandiaga 34,8 persen. "Debat ini jadi penentu. Kalau 25 persen pemilih mengambang ini ke Prabowo-Sandi, itu harus diwaspadai pihak Jokowi-Ma'ruf," kata Burhanuddin.

Meskipun format pertanyaan debat kali ini berbeda karena pertanyaan terbuka yang disusun tim panelis akan disampaikan KPU kepada setiap kandidat, Burhanuddin menilai publik akan tetap antusias menyaksikan debat.

Terkait hal itu, KPU telah mendapatkan daftar pertanyaan terbuka yang disusun panelis pada Sabtu dan Minggu lalu. Saat ini daftar pertanyaan itu sedang diperiksa tim dari KPU sebelum akhirnya dikirimkan kepada setiap pasangan calon.

Anggota KPU, Pramono Ubaid Tanthowi, mengatakan, KPU perlu memeriksa daftar pertanyaan itu agar jangan ada yang mengarah hanya kepada salah satu kandidat. "Redaksinya juga kami pastikan mudah ketika dibaca oleh moderator," ujarnya.

Pertanyaan terbuka itu, lanjut Pramono, saat debat akan diletakkan di gelas kaca dan diambil acak oleh setiap kandidat.

Sejauh ini, Ketua KPK Agus Rahardjo dan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyatakan tidak akan hadir dalam acara debat. Pertimbangan kelembagaan menjadi alasan mereka karena tidak menginginkan lembaga mereka terkait dengan kepentingan politik apa pun.

(REK/AGE/LAS/MTK)